



PEMERINTAH KOTA DUMAI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



2021- 2026

RENSTRA

Rencana Strategis

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JALAN PUTRI TUJUH NO. 04
KEL. TELUK BINJAI KEC. DUMAI TIMUR
KOTA DUMAI**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika	7
2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika	10
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	11
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	16
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	17
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	20
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	23
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	27
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	27
BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN	28
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika	
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	31
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	33
INDIKATIF	
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	54
BAB VIII PENUTUP	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bidang komunikasi dan Informatika di masa era digital ini sangatlah penting, kehadirannya dalam bentuk Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sudah menjadi tuntutan kebutuhan baik di lingkungan pemerintahan, swasta maupun masyarakat dan individu yang pada akhirnya akan mewujudkan konsep masyarakat informasi.

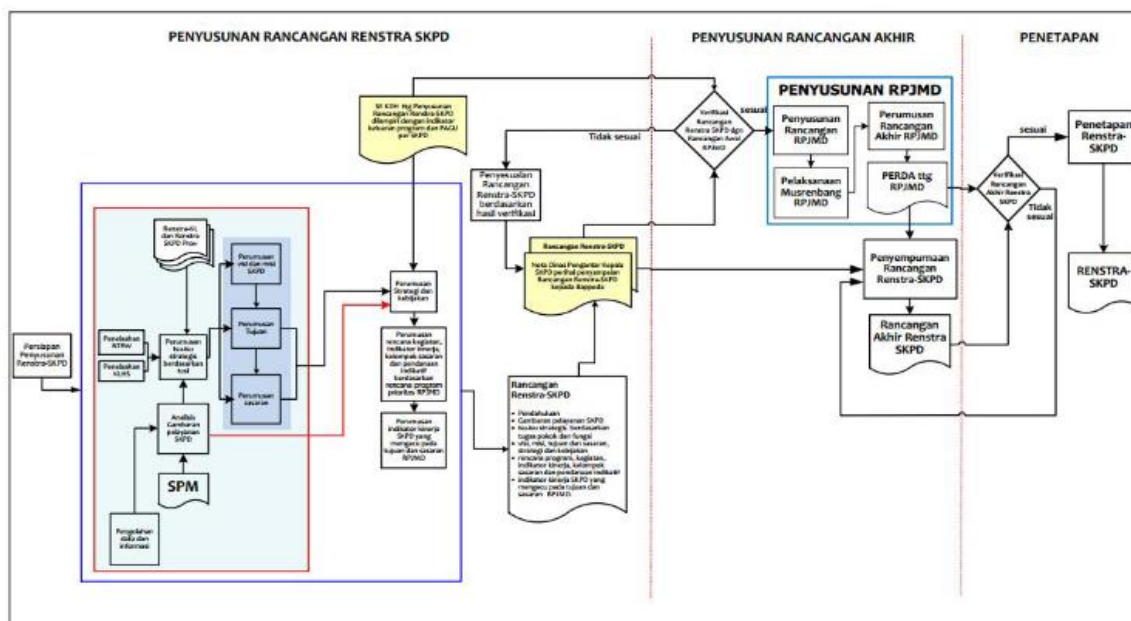
Penggunaan Teknologi Informasi di lingkungan Pemerintah, baik di Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota telah mengalami kemajuan sangat pesat. Pada tataran birokrasi, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi trend baru, diawali dengan munculnya isu “elektronik government (e-Gov)” yaitu pemerintahan yang berbasis elektronik.

Selaras dengan hal tersebut, rencana pembangunan Kota Dumai juga menekankan pentingnya peran TIK dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik inisiatif-inisiatif TIK kota juga dilakukan dalam rangka mewujudkan misi keempat Pemerintah Kota Dumai yaitu Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan daerah yang baik.

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan suatu dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun untuk mewujudkan target indikator kinerja daerah pada RPJMD dan sasaran pembangunan nasional bersifat indikatif. Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, Diskominfo berkewajiban menyiapkan Renstra yang secara teknis merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Dumai tahun 2021-2026, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dalam pelaksanaannya, Renstra tersebut akan dijabarkan kembali ke dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) yang memuat prioritas program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Kemudian hasil capaian program dan Kegiatan tersebut wajib diinformasikan dan dilaporkan kepada stakeholders, yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj).

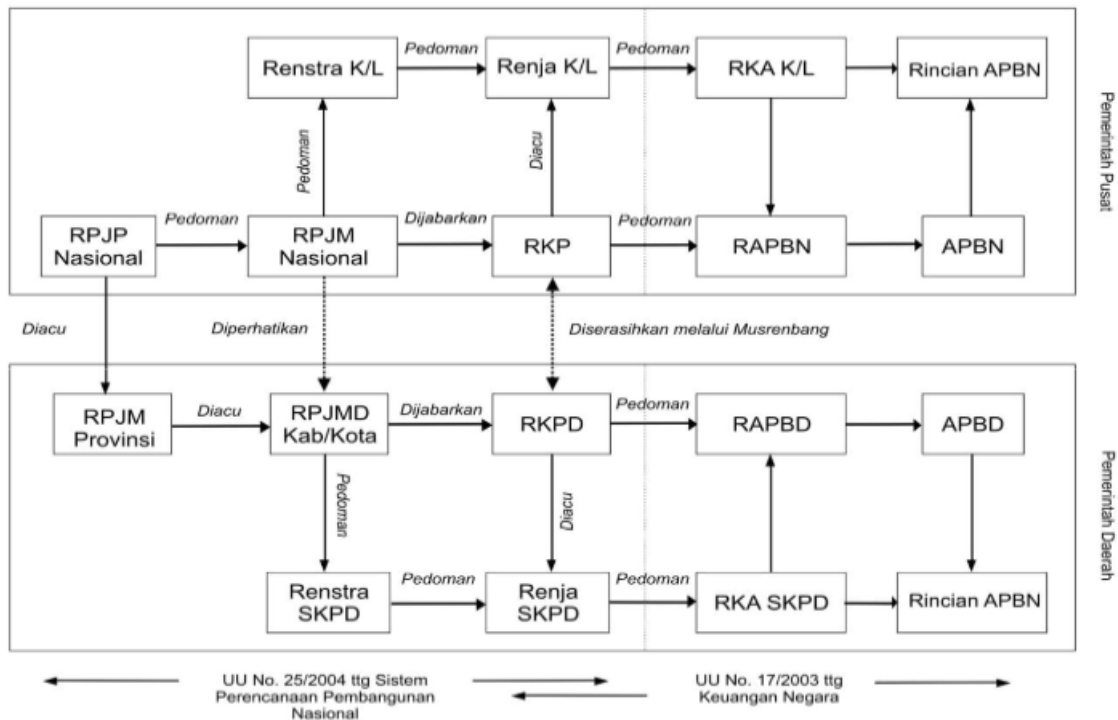
Proses Penyusunan Rencana Strategis dapat dilihat pada Gambar dibawah ini :



Selanjutnya keberadaan Rencana startegis Dinas Komunikasi dan Infromatika akan menjadi pedoman bagi penyusunan rencana kerja setiap tahunnya yang akan menjadi dasar penetapan RKPd Kota Dumai.

Gambaran tentang hubungan antara Renstra Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem

perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar berikut ini :



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026;
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Walikota Dumai Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi

dan Informatika Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 14 Seri D).

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 5 tahun yang memberikan arah sekaligus untuk menyediakan acuan kesesuaian program dan kegiatan yang sangat strategis Perangkat Daerah.

Adapun Tujuan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika adalah:

1. Mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 5 tahun yang tersusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai (RPJMD 2021-2026).
2. Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 5 tahun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah- langkah / kebijakan tugas - tugas sesuai dengan
4. Bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum



1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika

Sesuai dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai, maka Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian,

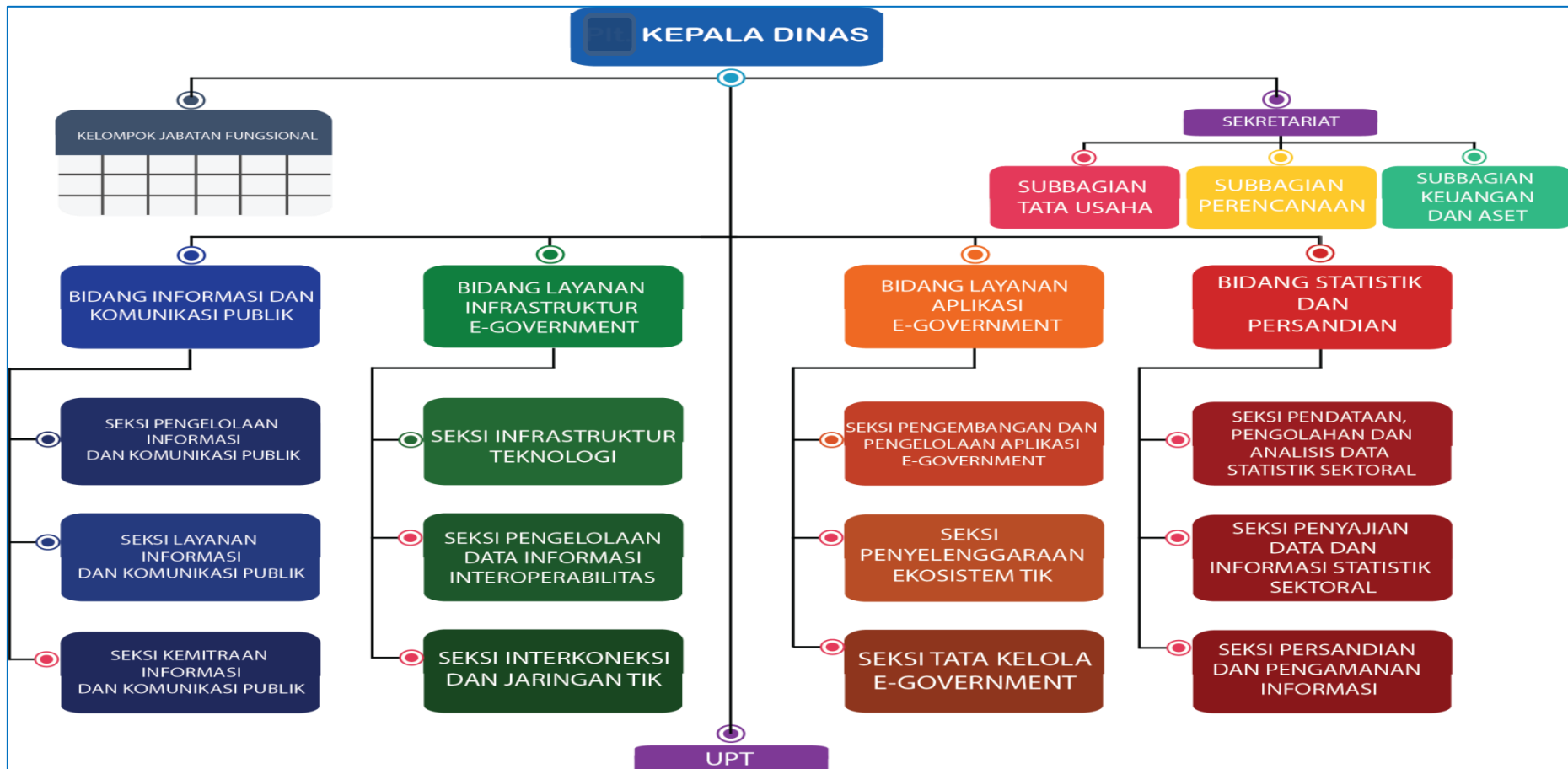
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Layanan Infrastruktur E-Government, Bidang Layanan Aplikasi E-Government, Bidang Statistik dan Persandian;
- b. Pelaksanaan kebijakan pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Layanan Infrastruktur E-Government, Bidang Layanan Aplikasi E-Government, Bidang Statistik dan Persandian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Layanan Infrastruktur E-Government, Bidang Layanan Aplikasi E-Government, Bidang Statistik dan Persandian;
- d. Pelaksanaan administrasi pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Layanan Infrastruktur E-Government, Bidang Layanan Aplikasi E-Government, Bidang Statistik dan Persandian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Tata Usaha;
 2. Subbagian Perencanaan; dan
 3. Subbagian Keuangan dan Asset;
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari:
 1. Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
 2. Seksi Layanan Informasi dan Komunikasi Publik; dan
 3. Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik;
- d. Bidang Layanan Infrastruktur E-Government, terdiri dari:
 1. Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
 2. Seksi Pengelolaan Data Informasi dan Interoperabilitas, dan;
 3. Seksi Interkoneksi dan Jaringan TIK;
- e. Bidang Layanan Aplikasi E-Government, terdiri dari:
 1. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi E-Government;
 2. Seksi Penyelenggaraan Ekosistem TIK; dan
 3. Seksi Tata Kelola E-Government;
- f. Bidang Statistik dan Persandian, terdiri dari:
 1. Seksi Pendataan, Pengolahan dan Analisis Data Statistik Sektoral;
 2. Seksi Penyajian Data dan Informasi Statistik Sektoral; dan
 3. Seksi Persandian dan Pengamanan Informasi.
- g. UPT; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

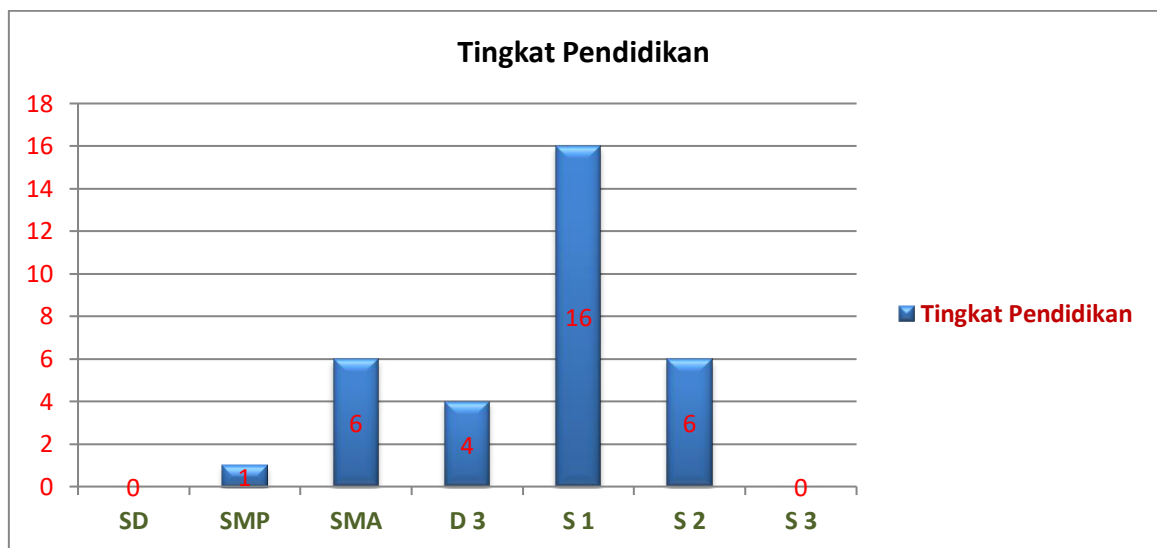
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA KOTA DUMAI



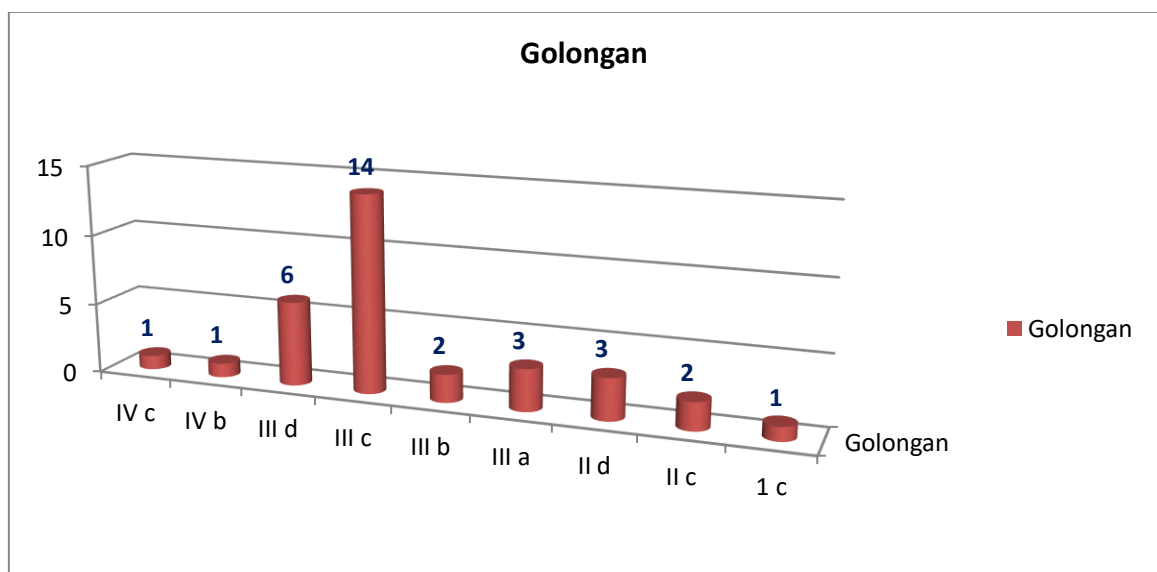
2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas, pada tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai memiliki pegawai sebanyak 33 orang PNS, yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kasubbag dan Kepala Seksi.

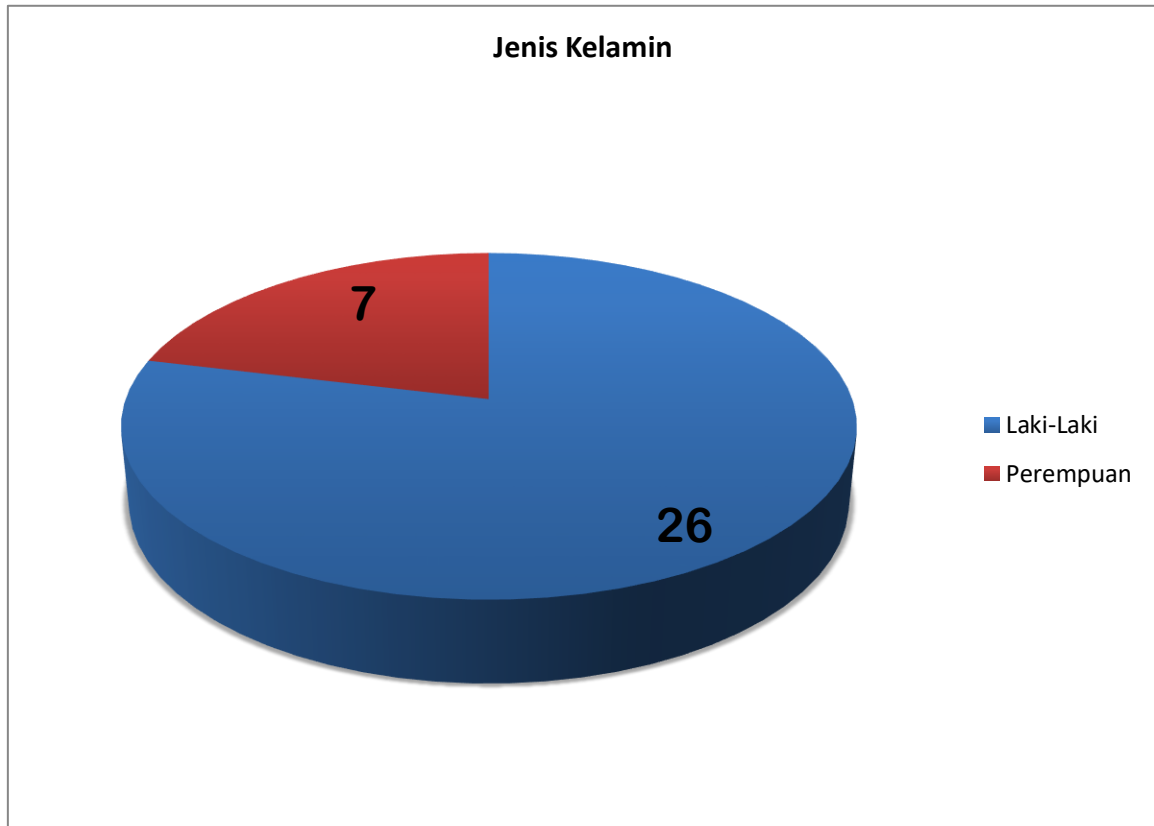
Berdasarkan tingkat pendidikan PNS Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai, sebagai berikut :



Berdasarkan golongan PNS Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai, sebagai berikut :



Berdasarkan jenis kelamin PNS Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai, sebagai berikut :



Sarana dan prasarana berupa aset yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika, dapat dilihat pada lampiran rencana strategis ini.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai 2019 – 2021 yang mengacu pada RPJMD Kota Dumai 2016 – 2021 dapat dilihat pada lampiran dokumen renstra ini.

Tabel
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai

No	Indikator Kinerja yang mengacu kepada RPJMD 2016-2021	Satuan	Target tahun						Realisasi capaian tahun ke						Rasio capaian pada tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kategori e-Government Kota Dumai	Indeks	-	-	-	2	2,5	2,81	-	-	-	2,54	2,25		-	-	-	127%	90,00%	
2	Jumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang terkoneksi ke jaringan internet	OPD	-	-	-	24	32	36	-	-	-	36	36		-	-	-	150%	112,50%	
3	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibina	Kelompok	-	-	-	5	7	7	-	-	-	7	7		-	-	-	140%	100,00%	
4	Persentase Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang di Publikasikan ke Media Massa	Persen	-	-	-	90	95	100	-	-	-	100	100		-	-	-	111%	105,26%	

Jika dilihat Indikator Kinerja yang mengacu kepada RPJMD 2016-2021 pada poin 1 kategori e-government Kota Dumai, pada tahun 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai menetapkan target indeks SPBE 2,5 dengan realisasi 2,25 sehingga pada tahun tersebut tidak mencapai target. Hasil evaluasi SPBE yang dilakukan oleh Kemenpan RB, ditujukan untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Pemerintah Kota Dumai, serta memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE, dan meningkatkan pelaksanaannya.

Terkait dengan indikator kinerja Jumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang terkoneksi ke jaringan internet, Dinas Komunikasi dan Informatika dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Pencapaian target ini di peroleh dari kegiatan yang menyediakan akses internet kepada OPD dengan dukungan tenaga ahli yang dimiliki. Namun untuk periode tahun renstra berikutnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai akan menaikkan target akses internet sampai ke wilayah yang belum terjangkau.

Indikator kelompok informasi masyarakat yang dibina dengan realisasi 7 kelompok informasi masyarakat yang telah dibina dengan capaian 100%. Pencapaian target kinerja tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Keberhasilan target ini didukung oleh kegiatan Penyebarluasan yang bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat.

Pengembangan dan pembinaan KIM memiliki peranan strategis dalam upaya menyongsong masyarakat informasi sebagai kehidupan masyarakat digital. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai melakukan pembinaan terhadap KIM yang sudah terbentuk. Pembinaan yang dilakukan antara lain KIM diharapkan dapat mengetahui, memahami tugas dan perannya. Adapun tugas KIM sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi;
2. Memberdayakan masyarakat agar dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat;
3. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat maupun dengan pihak lain;
4. Menghubungkan satu kelompok masyarakat dengan kelompok lain untuk wujudkan kebersamaan, kesatuan persatuan bangsa.

Target dari indikator Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang di Publikasikan ke Media Massa dengan realisasi capaian pada tahun 2020 sebanyak 100% atau sebesar 105,26 %. Dengan demikian pencapaian target kinerja tersebut melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2020. Pencapaian keberhasilan ini didukung oleh Program kerjasama informasi dengan mass media.

Kegiatan yang mendukung tercapainya target indikator ini adalah Penyelenggaraan Layanan Informasi Daerah yang dilaksanakan selama tahun 2020. Adapun indikator untuk kegiatan ini adalah Jumlah jenis publikasi informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan target kinerja 4 jenis publikasi. Publikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Dumai melalui media cetak, televisi, radio dan online. Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan kerjasama dengan media dalam hal penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintah daerah setiap tahunnya. Kerjasama media pada tahun 2020 ini terdiri dari 14 (empat belas) media cetak, 44 (empat puluh empat) media online dan 2 (dua) media televisi.

Tabel
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai

No	Program	Anggaran pada tahun (Rp.)					Realisasi Anggaran pada tahun (Rp.)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	1.089.747.260	1.031.401.094	-	-	-	1.050.492.109	1.007.961.120	-	-	-	96.40	97.73	-	1.060.574.177	1.029.226.615
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	1.214.003.600	176.970.000	-	-	-	1.173.847.730	172.820.000	-	-	-	96.69	97.65	-	695.486.800	673.333.865
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	-	-	-	15.000.000	-	-	-	-	14.500.000	-	-	-	96.67	-	-	7.500.000	14.500.000

	Aparatur																	
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	69.029.000	35.850.000	-	-	-	66.610.000	35.850.000	-	-	-	96.50	100	-	52.439.500	51.230.000
5	Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa	-	-	3.172.642.500	4.459.772.100	-	-	-	3.142.784.986	4.452.242.128	-	-	-	99.06	99.83	-	3.816.207.300	3.797.513.557
6	Fasilitas Peningkatan	-	-	232.351.438	16.577.753	-	-	-	227.146.760	16.577.753	-	-	-	97.76	100	-	124.464.596	121.862.257

	SDM Bida ng Kom unik asi dan Infor masi																	
7	Kerja sama Infor masi deng an Mass Medi a	-	-	2.769.737.000	1.903.080.410	-	-	-	2.448.520.165	1.847.259.410	-	-	-	88.40	97.07	-	2.336.408.705	2.147.889.788
8	Penyeleng garaan Persa ndian Untu k Peng aman an Infor masi di Peme rinta h Daer ah	-	-	92.366.000	42.146.417	-	-	-	91.732.962	40.646.417	-	-	-	99.31	96.44	-	67.256.209	66.189.690

9	Pengembangan Data /Informasi /Statistik Daerah	-	-	147.56 6.000	106.90 2.030	-	-	-	147.38 8.424	100.40 2.030	-	-	-	99.88	93.9 2	-	127.23 4.015	123.89 5.227
10	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	29.995 .000	20.595 .000	-	-	-	26.145 .000	20.220 .000	-	-	-	87.16	98.1 8	-	25.295 .000	23.182 .500
11	Program Penyebarluasan Informasi Pemerintah Daerah	-	-	30.865 .000	-	-	-	-	30.825 .000	-	-	-	-	100	-	-	15.432 .500	15.412 .500

Dari tabel tersebut diatas, dapat kita lihat bahwa Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai yang tersedia pada APBD Kota Dumai tidak terjadinya kesenjangan pelayanan dalam pemenuhan target indikator yang sudah ditetapkan pada rencana strategis.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Tantangan yang akan dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penyelenggaraan e-government ;
2. Pengelolaan website Pemerintah Kota dan Perangkat daerah terintegrasi dan terupdate ;
3. Semakin cerdasnya masyarakat terkait kebutuhan akan informasi (Keberadaan UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak warga negara untuk mengakses informasi publik) ;
4. Jaminan keamanan sistem TIK ;
5. Belum tersedianya satu data yang terintegrasi ;
6. Masih rendahnya ketersediaan Sumber Daya Manusia yang handal dan profesional khususnya yang menguasai bidang IT (Analisis, Aplikasi, Database, Pemrograman dan Jaringan).

Adapun peluang yang bisa memberikan peluang berkembangnya bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai dimasa depan antara lain :

1. Kemajuan teknologi informasi ;
2. Keinginan yang tinggi dari masyarakat untuk memperoleh informasi ;
3. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat ;
4. Adanya partisipasi dan kemitraan komunikasi sosial antar Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan masyarakat (komunikasi) ;
5. Media massa, elektronik dan online yang sangat berkembang baik milik pemerintah maupun swasta ;
6. Edukasi Internet sehat dan aman yang cerdas, kreatif dan produktif ;
7. Akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan Negara.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Organisasi Perangkat Daerah di masa yang akan datang.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah permasalahan aktual/krusial/penting yang dihadapi Perangkat Daerah, diidentifikasi menggunakan pendekatan ilmiah (teknokratik) melalui analisis data dan informasi gambaran pelayanan Perangkat Daerah dalam upaya menciptakan pelayanan publik dan mencapai visi, misi kepala daerah.

Perumusan isu strategis bertujuan mengungkapkan keadaan lingkungan internal dan eksternal yang sangat mempengaruhi kinerja Perangkat Daerah dalam pelayanan publik. Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi isu-isu strategis yang terdapat dalam rancangan awal RPJMD yang disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan publik, telaahan terhadap RTRW, KLHS, Renstra Kementerian/Lembaga/Renstra Perangkat Daerah provinsi.

Pembangunan sarana komunikasi dan informatika di Kota Dumai menunjukkan hasil yang mengembirakan. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain :

Tabel
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sararan
pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Pelayanan Infrastruktur koneksi Jaringan Internet	Belum semua instansi perkantoran yang terkoneksi jaringan internet	Infrastruktur jaringan internet yang dibangun Internet Service Provider (ISP) yang belum sampai ke daerah tersebut.
		Peralatan sarana pendukung yang masih kurang	Server, radio wireless, akses point (mikrotik dan Modem), Tower triangle yang di miliki Diskominfo yang masih kurang sehingga bisa menyebabkan terkendalanya dan lambatnya dalam hal pengoperasian TIK guna optimalnya pelaksanaan SPBE
		Belum optimalnya penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai	Penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai belum maksimal
		Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)	Keahlian bidang TIK masim kurang
		Belum optimalnya Informasi dan Komunikasi Publik	Informasi dan Komunikasi publik belum maksimal

2	Pelayanan Statistik	Bidang	Belum handalnya data statistik yang bersumber dari Pemerintah daerah (Statistik)	Kurangnya koordinasi berbagai pihak dalam penyediaan data dan informasi yang digunakan untuk perencanaan pembangunan daerah
			Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia dalam pendataan dan statistik daerah	
3	Pelayanan Persandian	Bidang	Masih perlunya peningkatan sistem pengamanan pada jaringan komunikasi dan sistem informasi di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.	Kurangnya sarana dan prasana bidang persandian
			Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia dalam bidang persandian	

Dalam mendukung kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Dumai khususnya dalam pengembangan dan pengelolaan layanan Infrastruktur e-Government, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai memiliki sarana dan prasarana yang masih minim. Ini dibuktikan dengan beberapa instansi yang belum adanya penggunaan akses internet yang di distribusikan dari Diskominfo.

Dari pantauan dilapangan, beberapa instansi yang belum terkoneksi akses internet tersebut dikarenakan faktor kondisi lokasi kantor yang begitu

jauh (pinggiran kota) dan juga belum adanya infrastruktur jaringan yang dibangun oleh Internet servis provider (ISP) di daerah tersebut.

Berdasarkan hal di atas, maka diperlukan pengelolaan yang bisa menjembatani antara ISP dan Kantor yang jauh tersebut agar bisa terkoneksi jaringan internet yaitu dengan menggunakan sarana Radio wireless dengan membangun Tower Internet (Triangle) serta dengan penambahan peralatan belanja modal server, router di Data Center.

Faktor Penghambat pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi antara lain adalah belum optimalnya penyelenggaraan e-government dan masih rendahnya ketersediaan Sumber Daya Manusia yang handal dan profesional khususnya yang menguasai bidang IT (Analisis, Aplikasi, Database, Pemrograman dan Jaringan).

Faktor Pendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi antara lain adalah adanya regulasi terkait penerapan SPBE dan dukungan dana yang memadai serta Kemajuan teknologi informasi;

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai mengacu pada visi misi dan program Walikota. Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026. Visi pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu”

Secara filosofi, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

- Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri unggul merupakan perwujudan dari kegiatan perekonomian Kota Dumai yang terletak di pesisir timur pulau Sumatera dan merupakan daerah pelabuhan yang

sangat strategis untuk dikembangkan bagi kegiatan ekspor dan impor serta industri yang bertumpu pada sektor pelayanan jasa kepelabuhanan dan industri.

- Dumai yang berbudaya Melayu merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat Dumai dimana kebudayaan Melayu dianggap sebagai "Roh Pembangunan Kota Dumai" dengan cara menjabarkan nilai-nilai budayanya sebagai inspirasi dan dasar pembangunan. Pelaksanaan pembangunan dibidang kebudayaan dapat meningkatkan daya tarik/promosi daerah tentang seni budaya daerah.
- Tahun 2026 : Merupakan batas akhir pencapaian visi dan misi yang merujuk pada masa perencanaan pembangunan daerah periode 2021-2026 yang realisasi pencapaiannya diukur dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Untuk merealisasikan visi pembangunan tersebut maka ditetapkan misi pembangunan Kota Dumai, sebagai berikut :

1. Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjiwa Melayu
3. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan daerah yang baik

Melalui Strategi Visi Misi yang saat ini sudah ada melalui penyelenggaraan Sistem Informasi yang mengarah pada suatu tujuan yaitu mewujudkan peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik melalui Instrumen SPBE sehingga diharapkan layanan yang bukan sekedar Good Government namun diharapkan segera berevolusi menuju Kota Dumai Smart Government melalui penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) seperti yang telah di amanatkan pada Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018.

Untuk melakukan penerapan *Enterprise Architecture (EA)* melalui penyelenggaraan SPBE Kota Dumai perlu dilakukan perancangan yang

merupakan pendekatan dalam membangun *enterprise* berdasarkan dorongan kebutuhan data dan dorongan kebutuhan proses bisnis / layanan terintegrasi, perancangan ini terdiri dari 4 (empat) lapisan yaitu:

1. Perencanaan

Pada tahap ini Kota Dumai membutuhkan kerangka pengerjaan perancangan *Enterprise Architecture (EA)* yang berisikan cakupan atau area batasan, visi, misi, sumber daya, metodologi perencanaan serta membentuk tim perencana agar proyek perencanaan terarah, selesai tepat waktu dan memiliki tim berkualitas. Konsekuensinya pada tahap ini Kota Dumai sudah harus mendapatkan komitmen manajemen dan juga pembiayaan untuk dapat melanjutkan ke tahap berikutnya.

2. Tinjauan kondisi kebutuhan pelaksanaan saat ini

a. Pemodelan proses bisnis

Tahap ini bertujuan untuk membangun suatu basis pengetahuan mengenai layanan dan sistem informasi yang digunakan Pemko Dumai saat ini. Tahap ini merupakan proses untuk mendefinisikan layanan pemerintahan, selanjutnya dibuat suatu matriks relasi antara fungsi pemerintahan dengan unit organisasi guna mengetahui tanggung jawab dari masing-masing unit organisasi terhadap suatu fungsi layanan.

b. Sistem dan teknologi

Tahap ini tengah dilaksanakan pengidentifikasian dan Mendokumentasikan sistem aplikasi dan *platform* teknologi yang digunakan Pemko Dumai dalam mendukung fungsi bisnis saat ini. Karena *enterprise* yang telah berjalan pada umumnya telah memiliki sistem dan teknologi pada aplikasi-aplikasi sistem informasinya. Hasil dokumentasi disebut sebagai Katalog Sumber Daya Informasi (*Information Resource Catalog* atau *IRC*) atau disebut juga *Systems Inventory*. *IRC* tidak menjabarkan setiap sistem secara terperinci, melainkan hanya ringkasannya saja.

3. Tinjauan rencana masa depan

a. Arsitektur Data

Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan jenis-jenis data utama atau entitas data yang diperlukan bagi Pemko Dumai

guna mendukung fungsi-fungsi bisnis yang telah didefinisikan pada tahap pemodelan bisnis kemudian merelasikan entitas data tersebut dengan fungsi Layanan Pemerintahan Pemko Dumai.

b. Arsitektur Aplikasi

Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan jenis-jenis aplikasi utama yang dibutuhkan untuk mengelola data dan mendukung fungsi Layanan Pemerintahan Kota Dumai/Merelasikan aplikasi dengan fungsi Layanan Pemerintah. Arsitektur aplikasi bukan rancangan sistem tetapi merupakan pendefinisian aplikasi apa saja yang dibutuhkan untuk mengelola data dan menyediakan informasi bagi user atau pengguna layanan baik internal maupun eksternal

c. Arsitektur Teknologi

Tahap ini merupakan suatu pendekatan dalam menjelaskan struktur dan hubungan Metodologi Sistem Informasi saat ini serta di masa depan. Tujuannya adalah untuk mendefinisikan *platform* teknologi yang dibutuhkan untuk menyediakan lingkungan yang mendukung aplikasi dalam mengelola data dan mendukung fungsi Layanan Pemerintahan.

4. **Penyusunan strategi pencapaian**

Tahap ini bertujuan untuk menyusun dan menyiapkan suatu rekomendasi untuk rencana pengimplementasian yang berdasarkan pada arsitektur yang telah dibuat. Adapun langkah-langkah pada tahap rencana implementasi adalah:

- a. Menentukan urutan prioritas pengembangan aplikasi;
- b. Membuat estimasi-estimasi pelaksanaan implementasi;
- c. Membuat kesimpulan perencanaan.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informasi

Visi Kemenkominfo

Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019, tidak ada lagi Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini ditekankan kembali melalui Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 yang menambahkan teknis perumusan visi dan misi dalam dokumen Renstra Kementerian/Lembagayang selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, Kemenkominfo akan berupaya menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: **“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong.”** Pada pelaksanaannya, pencapaian visi tersebut dilakukan sesuai tugas Kemenkominfo yang disebutkan pada Perpres Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, serta Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Misi Kemenkominfo

Seperti halnya visi, sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019, misi Menteri/Pimpinan Lembaga wajib mengacu pada misi Presiden dan Wakil Presiden. Berikut adalah penjabaran visi, misi Presiden nomor 1, 2, 3, 5, 8, dan 9 dengan uraian sebagai berikut :

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;

2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi dan hubungan kelembagaan; dan
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Tujuan Kemenkominfo

Tujuan Kemenkominfo merupakan rumusan kondisi yang ingin dicapai di tahun 2024. Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024 memiliki tujuan strategis untuk mengembangkan ekosistem digital nasional yang mendukung pencapaian visi dan misi Presiden serta fokus pembangunan pemerintah. Tujuan ini dicapai dengan fokus utama, yaitu pemerataan infrastruktur TIK, percepatan transformasi digital, dan pengelolaan komunikasi publik. Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, Kemenkominfo memetakan Arah Pembangunan Nasional ke dalam (3) tiga tujuan utama Kemenkominfo sebagai fokus pada pembangunan bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Sasaran Kemenkominfo

Dalam mewujudkan tujuan diatas, Kemenkominfo menetapkan sasaran strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika untuk tahun 2020 –2024 sebagai berikut :

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;

2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
3. Meningkatnya konektivitas layanan pos;
4. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional;
5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;
7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;
9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Pada penggalan tahun 2019 - 2024 rumusan Visi pemerintah Provinsi Riau adalah :

“Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul Di Indonesia (Riau Bersatu)”.

Misi pembangunan Provinsi Riau untuk 5 tahun kedepan, yang menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau adalah misi ke 5 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Informasi, dengan tujuan peningkatan kinerja ASN pelayanan publik, dan peningkatan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi. Sasaran umum yang merupakan target atau hasil yang diharapkan dari pembangunan Provinsi Riau dalam kurun waktu lima tahun ke depan dimana atas keberhasilan target ini diharapkan berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Sasaran yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau adalah sasaran yang ke 2 pada Misi ke 5, yaitu Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Informasi.

Program Unggulan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan Misi ke lima ini yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan

Statistik Provinsi Riau adalah : Program Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Oleh sebab itu Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau dituntut untuk dapat mewujudkan misi tersebut, untuk mencapai misi tersebut di atas tidak lepas dari dukungan tata pemerintahan yang handal dan kerjasama lintas sektor lingkup pemerintah Provinsi Riau, sehingga dapat menciptakan tatakelola yang handal, perlu melakukan terobosan melalui kinerja yang dilaksanakan secara terpadu, terintegrasi akuntabel untuk mewujudkan pembangunan di Provinsi Riau.

Oleh karena itu perlu komitmen dan kompetensi SDM bidang teknologi informasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia aparaturinya.

3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Berdasarkan Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Dinas Komunikasi dan Informatika dalam upaya melaksanakan program dan kegiatan tidak secara langsung berkaitan dengan telahaan RTRW.

3.4.2 Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Dinas Komunikasi dan Informatika dalam upaya melaksanakan program dan kegiatan juga tidak secara langsung berkaitan dengan telahaan KLHS.

3.5 Penentuan Isu Strategis

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian di daerah, setelah memperhatikan faktor eksternal, internal termasuk tantangan, kekuatan, dan kelemahan Dinas Komunikasi dan Informatika maka dapat disimpulkan isu-isu strategis yang berkembang adalah :

1. Penerapan *e-government* di lingkungan Pemerintah Kota Dumai (SPBE) ;
2. Sarana dan prasarana pendukung dalam penyediaan akses internet;
3. Semakin berkembangnya TIK yang dapat dimanfaatkan untuk percepatan penyelenggaraan SPBE ;
4. Belum Optimalnya regulasi daerah dalam pelaksanaan SPBE

5. Belum Optimalnya sistem integrasi data statistik sektoral daerah.
6. Tata kelola keamanan informasi persandian di Pemerintah Daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Dumai. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai harus sejalan dengan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Dumai, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Dumai.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai tahun 2021-2026 adalah : **“Meningkatkan pengelolaan dan penggunaan Sistem Informasi Daerah”**.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Adapun sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai tahun 2021-2026 adalah : **“Terwujudnya pengelolaan dan penggunaan sistem informasi daerah yang baik”**.

Untuk mengetahui lebih jelas tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai tahun 2022-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021 – 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator		Target Kinerja/Sasaran				
			Tujuan/Sasaran	Satuan	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan pengelolaan dan penggunaan Sistem Informasi Daerah	Terwujudnya pengelolaan dan penggunaan sistem informasi daerah yang baik	Persentase akses jaringan internet yang disediakan Pemerintah Daerah	%	82	85	90	95	100
			Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang disampaikan melalui media	%	85	88	92	96	98

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Hal tersebut diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan.

Strategi adalah langkah-langkah berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah/tindakan untuk mencapai tujuan. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja pemerintah Daerah, pada ketentuan umum pasal 1, disebutkan bahwa :

- Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
- Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai merupakan langkah-langkah dan arah yang akan diambil untuk mencapai visi dan misi yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Tabel
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu			
Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan daerah yang baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan 1 : Terlaksananya Reformasi Birokrasi	Sasaran 1 : Meningkatnya Pelayanan Publik dan akuntabilitas Pemerintah Daerah	Strategi 1.1 : Melaksanakan pemerintahan yang efektif dan efisien berbasis IT	Kebijakan 1.1 : Meningkatkan Sistem Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
			Kebijakan 1.2 : Mewujudkan saluran akses formal aspirasi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun.

Rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai yang akan dan harus dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan, selaras dengan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - ✓ Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - ✓ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - ✓ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - ✓ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - ✓ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - ✓ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - ✓ Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - ✓ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - ✓ Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - ✓ Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - ✓ Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

- ✓ Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- ✓ Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - ✓ Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - ✓ Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - ✓ Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - ✓ Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- ✓ Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - ✓ Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - ✓ Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - ✓ Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - ✓ Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- ✓ Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
- ✓ Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- ✓ Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
- ✓ Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media
- ✓ Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
- ✓ Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
- ✓ Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
- ✓ Sub Kegiatan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

C. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA

1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- ✓ Sub Kegiatan Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kota
- ✓ Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- ✓ Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

2. Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- ✓ Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- ✓ Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik
- ✓ Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
- ✓ Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah

- ✓ Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
- ✓ Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
- ✓ Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
- ✓ Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosystem Kota Cerdas
- ✓ Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
- ✓ Sub Kegiatan Pengelolaan GCIO
- ✓ Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

D. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral diLingkup Daerah Kabupaten/Kota

- ✓ Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
- ✓ Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral
- ✓ Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah
- ✓ Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi
- ✓ Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral
- ✓ Sub Kegiatan Pengembangan infrastuktur

E. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- ✓ Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
- ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- ✓ Sub Kegiatan Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota
- ✓ Sub Kegiatan Pengawasan dan evaluasi keamanan informasi

Adapun rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta Pendanaan indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai, dapat di lihat pada Tabel di bawah ini;

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatorif Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 — 2026

Kota Dumai

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun - 2022		Tahun - 2023		Tahun - 2024		Tahun - 2025		Tahun - 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatkan pengelolaan dan penggunaan Sistem Informasi Daerah	Terwujudnya pengelolaan dan penggunaan sistem informasi daerah yang baik	Indeks layanan SPBE		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintah bidang Komunikasi dan Informatika , bidang Statistik dan Persandian		100 %	6.790.987.926	100 %	7.410.294.324	100 %	7.491.999.176	100 %	7.517.447.094	100 %	7.429.777.094	100%	36.640.505.614		

		Jumlah akses jaringan internet yang disediakan Pemerintah Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 dokumen	135.500.000	10 dokumen	121.500.000	9 dokumen	124.000.000	9 dokumen	125.500.000	9 dokumen	138.500.000	47 dokumen	645.000.000		
		Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang disampaikan melalui media	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja dan Renja-P)	3 dokumen	50.000.000	3 dokumen	30.000.000	2 dokumen	30.000.000	2 dokumen	30.000.000	2 dokumen	30.000.000	7 dokumen	170.000.000	Diskominfo	Kota Dumai
		Nilai ketebukaan informasi publik	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	7.000.000	1 dokumen	9.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	12.000.000	5 dokumen	48.000.000	Diskominfo	Kota Dumai

				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD	1 doku men	6.000.000	1 doku men	7.000.000	1 doku men	7.000.000	1 doku men	8.000.000	1 doku men	9.000.000	5 doku men	37.000.000	Diskominfo	Kota Dumai
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 doku men	7.000.000	1 doku men	7.000.000	1 doku men	8.000.000	1 doku men	8.000.000	1 doku men	8.000.000	5 doku men	38.000.000	Diskominfo	Kota Dumai
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan DKA-SKPD	1 doku men	6.000.000	1 doku men	6.500.000	1 doku men	7.000.000	1 doku men	7.500.000	1 doku men	7.500.000	5 doku men	34.500.000	Diskominfo	Kota Dumai
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (LKJP dan LKJIP)	2 doku men	50.000.000	2 doku men	50.000.000	2 doku men	50.000.000	2 doku men	50.000.000	2 doku men	60.000.000	10 doku men	260.000.000	Diskominfo	Kota Dumai
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen PK, RKT dan RA	1 doku men	9.500.000	1 doku men	12.000.000	1 doku men	12.000.000	1 doku men	12.000.000	1 doku men	12.000.000	5 doku men	57.500.000	Diskominfo	Kota Dumai
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	3 doku men	3.790.487.926	3 doku men	3.890.794.324	3 doku men	3.890.999.176	3 doku men	3.891.947.094	3 doku men	3.891.277.094	15 doku men	19.355.505.614		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	3.700.487.926	14 bulan	3.800.794.324	14 bulan	3.800.999.176	14 bulan	3.801.947.094	14 bulan	3.801.277.094	70 bulan	18.905.505.614	Diskominfo	Kota Dumai

				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	40.000.000	5 dokumen	200.000.000	Diskominfo	Kota Dumai
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan analisis prognosis realisasi anggaran	2 laporan	50.000.000	2 laporan	50.000.000	2 laporan	50.000.000	2 laporan	50.000.000	2 laporan	50.000.000	10 laporan	250.000.000	Diskominfo	Kota Dumai
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3 laporan	80.000.000	3 laporan	90.000.000	3 laporan	90.000.000	3 laporan	90.000.000	3 laporan	90.000.000	15 laporan	440.000.000		
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan RKBMD SKPD	1 laporan	20.000.000	1 laporan	20.000.000	1 laporan	20.000.000	1 laporan	20.000.000	1 laporan	20.000.000	5 laporan	100.000.000	Diskominfo	Kota Dumai
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah	1 laporan	20.000.000	1 laporan	20.000.000	1 laporan	20.000.000	1 laporan	20.000.000	1 laporan	20.000.000	5 laporan	100.000.000	Diskominfo	Kota Dumai
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan inventarisasi Aset	1 laporan	40.000.000	1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000	5 laporan	240.000.000	Diskominfo	Kota Dumai

				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah	96 orang	300.000.000	120 orang	340.000.000	186 orang	440.000.000	120 orang	340.000.000	186 orang	440.000.000	708 orang	1.860.000.000		
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah pembinaan jasmani dan rohani	-	-	70 orang	40.000.000	70 orang	40.000.000	70 orang	40.000.000	70 orang	40.000.000	280 orang	160.000.000	Diskominfo	Kota Dumai
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	66 orang	75.000.000	-	-	66 orang	100.000.000	-	-	66 orang	100.000.000	198 orang	275.000.000	Diskominfo	Kota Dumai
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal	15 orang	100.000.000	25 orang	150.000.000	25 orang	150.000.000	25 orang	150.000.000	25 orang	150.000.000	115 orang	700.000.000	Diskominfo	Kota Dumai
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	15 orang	125.000.000	25 orang	150.000.000	25 orang	150.000.000	25 orang	150.000.000	25 orang	150.000.000	115 orang	725.000.000	Diskominfo	Kota Dumai
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat	12 bulan	755.000.000	12 bulan	915.000.000	12 bulan	922.000.000	12 bulan	970.000.000	12 bulan	970.000.000	60 bulan	4.532.000.000		

					Daerah															
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor	12 bulan	30.000.000	12 bulan	35.000.000	12 bulan	37.000.000	12 bulan	35.000.000	12 bulan	35.000.000	60 bulan	172.000.000	Diskominfo	Kota Dumai	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor	12 bulan	150.000.000	12 bulan	200.000.000	12 bulan	200.000.000	12 bulan	200.000.000	12 bulan	200.000.000	60 bulan	950.000.000	Diskominfo	Kota Dumai	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan	12 bulan	75.000.000	12 bulan	80.000.000	12 bulan	85.000.000	12 bulan	85.000.000	12 bulan	85.000.000	60 bulan	410.000.000	Diskominfo	Kota Dumai	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000.000	60 bulan	250.000.000	Diskominfo	Kota Dumai	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	450.000.000	12 bulan	550.000.000	12 bulan	550.000.000	12 bulan	600.000.000	12 bulan	600.000.000	60 bulan	2.750.000.000	Diskominfo	Kota Dumai	

				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49 unit	850.00 0.000	54 unit	1.000.0 00.000	29 unit	975.00 0.000	34 unit	1.050.0 00.000	23 unit	850.00 0.000	190 unit	4.725.0 00.000		
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas kantor	3 unit	350.00 0.000	3 unit	500.00 0.000	3 unit	500.00 0.000	3 unit	500.00 0.000	2 unit	500.00 0.000	15 unit	2.350.0 00.000	Diskomi	Ko ta Du ma i
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	45 unit	400.00 0.000	50 unit	400.00 0.000	25 unit	375.00 0.000	30 unit	450.00 0.000	20 unit	250.00 0.000	170 unit	1.875.0 00.000	Diskomi	Ko ta Du ma i
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun	1 unit	100.00 0.000	1 unit	100.00 0.000	1 unit	100.00 0.000	1 unit	100.00 0.000	1 unit	100.00 0.000	5 unit	500.00 0.000	Diskomi	Ko ta Du ma i
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	555.00 0.000	12 bulan	660.00 0.000	12 bulan	660.00 0.000	12 bulan	660.00 0.000	12 bulan	660.00 0.000	60 bulan	3.195.0 00.000		
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat	12 bulan	5.000.0 00	12 bulan	10.000. 000	12 bulan	10.000. 000	12 bulan	10.000. 000	12 bulan	10.000. 000	60 bulan	45.000. 000	Diskomi	Ko ta Du ma i

																					i
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	182.000.000	12 bulan	250.000.000	12 bulan	250.000.000	12 bulan	250.000.000	12 bulan	250.000.000	60 bulan	1.182.000.000	Diskominfo	Kota Dumai		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor	12 bulan	368.000.000	12 bulan	400.000.000	12 bulan	400.000.000	12 bulan	400.000.000	12 bulan	400.000.000	60 bulan	1.968.000.000	Diskominfo	Kota Dumai		
					Jumlah penyediaan kebutuhan jasa keamanan kantor																
					Jumlah penyediaan kebutuhan jasa administrasi perkantoran																
					Jumlah Penyediaan kebutuhan Jasa Tenaga Supir																
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	61 unit	325.000.000	56 unit	393.000.000	56 unit	390.000.000	56 unit	390.000.000	56 unit	390.000.000	273 unit	1.888.000.000				

				an Daerah	an Daerah yang dipelihara															
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	3 unit	150.000.000	3 unit	175.000.000	3 unit	175.000.000	3 unit	175.000.000	3 unit	175.000.000	15 unit	850.000.000	Diskominfo	Kota Dumai	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya gedung kantor yang dipelihara	55 unit	75.000.000	50 unit	68.000.000	50 unit	65.000.000	50 unit	65.000.000	50 unit	65.000.000	255 unit	338.000.000	Diskominfo	Kota Dumai	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab secara	3 unit	100.000.000	3 unit	150.000.000	3 unit	150.000.000	3 unit	150.000.000	3 unit	150.000.000	3 unit	700.000.000	Diskominfo	Kota Dumai	

			Lainnya	rutin/berkala															
			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Informasi dan Komunikasi Publik		80%	3.335.000.000	85%	3.990.000.000	90%	4.062.000.000	95%	4.220.000.000	100%	4.072.500.000	100%	19.679.500.000		
			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang dikelola		10 informasi	3.335.000.000	10 informasi	3.990.000.000	10 informasi	4.062.000.000	10 informasi	4.220.000.000	10 informasi	4.072.500.000	10 informasi	19.679.500.000		
			Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Informasi Media Publik		4 Media Publik	400.000.000	7 Media Publik	550.000.000	7 Media Publik	550.000.000	7 Media Publik	575.000.000	7 Media Publik	557.500.000	7 Media Publik	2.632.500.000	Diskominfo	Kota Dumai
			Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Informasi yang disampaikan melalui jaringan online Pemerintah Kota Dumai		1 media online	500.000.000	1 media online	600.000.000	1 media online	600.000.000	1 media online	600.000.000	1 media online	600.000.000	1 media online	2.900.000.000	Diskominfo	Kota Dumai
				Jumlah majalah gerak pembangunan Pemko Dumai		1 majalah		1 majalah		1 majalah		1 majalah		1 majalah		1 majalah			

				Pelayanan Informasi Publik	Jumlah layanan informasi daerah yang dikelola	80%	200.000.000	80%	230.000.000	80%	230.000.000	80%	250.000.000	85%	250.000.000	85%	1.160.000.000	Diskominfo	Kota Dumai
				Layanan Hubungan Media	Jumlah jenis publikasi informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	4 publikasi Media	1.800.000.000	4 publikasi Media	2.000.000.000	4 publikasi Media	2.000.000.000	4 publikasi Media	2.100.000.000	4 publikasi Media	2.000.000.000	4 publikasi Media	9.900.000.000	Diskominfo	Kota Dumai
				Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah kelompok informasi masyarakat (KIM) yang dibina	7 KIM	150.000.000	9 KIM	165.000.000	11 KIM	175.000.000	13 KIM	200.000.000	15 KIM	210.000.000	15 KIM	900.000.000	Diskominfo	Kota Dumai
				Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Sumber Daya yang Kompeten	-	-	80%	150.000.000	80%	150.000.000	80%	150.000.000	85%	150.000.000	85%	600.000.000	Diskominfo	Kota Dumai
				Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah event hari-hari besar	2 event	185.000.000	2 event	215.000.000	2 event	215.000.000	2 event	225.000.000	2 event	215.000.000	10 event	1.055.000.000	Diskominfo	Kota Dumai
					Jumlah pertemuan	4 pertemuan		8 pertemuan	8 pertemuan	8 pertemuan	8 pertemuan	8 pertemuan	8 pertemuan	8 pertemuan	36 pertemuan				

			Penyediaan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik		2 unit	100.00 0.000	2 unit	80.000. 000	6 unit	142.00 0.000	5 unit	120.00 0.000	3 unit	90.000. 000	16 unit	532.00 0.000	Diskomi nfo	Ko ta Du ma i
			PROGRAM APLIKASI INFORMATI KA	Persentase Layanan Publik yang diselenggar akan secara Online dan Terintegras i		13%	5.700.0 00.000	19%	6.015.0 00.000	22%	5.915.0 00.000	19%	5.920.0 00.000	27%	6.000.0 00.000	100%	29.550. 000.00 0		
			Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Domain dan Sub Domain yang dikelola dengan baik		2 dom ain	3.800.0 00.000	3 dom ain	3.830.0 00.000	4 dom ain	3.865.0 00.000	5 dom ain	3.850.0 00.000	5 dom ain	3.930.0 00.000	5 domai n	19.275. 000.00 0		
			Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kota	Jumlah domain yang terdaftar		2 dom ain	50.000. 000	7 dom ain	100.00 0.000	9 dom ain	115.00 0.000	10 dom ain	120.00 0.000	11 dom ain	150.00 0.000	37 domai n	535.00 0.000	Diskomi nfo	Ko ta Du ma i

			Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Website Pemko Dumai yang dikelola		5 website	50.000.000	7 website	100.000.000	8 website	120.000.000	7 website	100.000.000	10 website	150.000.000	37 website	520.000.000	Diskominfo	Kota Dumai
			Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah akses jaringan internet yang disediakan Pemerintah Daerah		90 akses internet	3.700.000.000	94 akses internet	3.630.000.000	99 akses internet	3.630.000.000	105 akses internet	3.630.000.000	110 akses internet	3.630.000.000	110 akses internet	18.220.000.000	Diskominfo	Kota Dumai
			Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerapan aplikasi e-Government		16%	1.900.000.000	18%	2.185.000.000	20%	2.050.000.000	22%	2.070.000.000	24%	2.070.000.000	100%	10.275.000.000		
			Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik		7 aplikasi	350.000.000	8 aplikasi	400.000.000	9 aplikasi	300.000.000	10 aplikasi	300.000.000	11 aplikasi	300.000.000	11 aplikasi	1.650.000.000	Diskominfo	Kota Dumai

			Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik	Tersedianya Dokumen / PERDA / PERKADA/ATURAN/TIM KOORDINASI DAERAH terkait implementasi e-government		1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	700.000.000	Diskominfo	Kota Dumai
			Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah pengembangan Pusat Data yang di kelola Pemerintah Daerah		1 Data Center	425.000.000	1 Data Center	475.000.000	1 Data Center	400.000.000	1 Data Center	350.000.000	1 Data Center	300.000.000	1 Data Center	1.950.000.000	Diskominfo	Kota Dumai
			Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintahan Daerah	Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan perundang undangan		1 laporan	100.000.000	1 laporan	150.000.000	1 laporan	150.000.000	1 laporan	150.000.000	1 laporan	150.000.000	5 laporan	700.000.000	Diskominfo	Kota Dumai
			Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah layanan data informasi elektronik yang di kelola		1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	165.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	125.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	690.000.000	Diskominfo	Kota Dumai
			Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kategori e-Government Kota Dumai		2,83 indeks	125.000.000	2,85 indeks	250.000.000	2,90 indeks	225.000.000	2,96 indeks	250.000.000	3,00 indeks	275.000.000	3,00 indeks	1.125.000.000	Diskominfo	Kota Dumai

			Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Persentase perangkat daerah yang mengimple mentasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	17%	100.00 0.000	17,6 %	150.00 0.000	20%	175.00 0.000	30,4 %	200.00 0.000	32%	225.00 0.000	100%	850.00 0.000	Diskomi nfo	Ko ta Du ma i
			Pengembangan dan Pengelolaan Ekosystem Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mengimple mentasikan inovasi yang mendukung smart city	5 OPD	50.000. 000	5 OPD	120.00 0.000	5 OPD	150.00 0.000	5 OPD	170.00 0.000	5 OPD	170.00 0.000	20 opd	660.00 0.000	Diskomi nfo	Ko ta Du ma i
			Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase ASN /pengelola TIK yang berkualitas / tersertifikasi /berkompe tensidi bawah pengelolaan Dinas Kominfo	16%	150.00 0.000	18%	175.00 0.000	20%	200.00 0.000	22%	225.00 0.000	24%	250.00 0.000	100%	1.000.0 00.000	Diskomi nfo	Ko ta Du ma i

				Pengelolaan GCIO	Jumlah dokumen pengelolaan GCIO	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	100%	450.000.000	Diskominfo	Kota Dumai		
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	100%	500.000.000	Diskominfo	Kota Dumai		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral	75%	350.000.000	75%	905.000.000	80%	952.000.000	80%	1.008.300.000	80%	1.068.470.000	4.283.770.000			
				Penyelenggaraan Statistik Sektoral diLingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah data sektoral perangkat daerah yang memenuhi prinsip satu data	37 OPD	350.000.000	37 OPD	905.000.000	37 OPD	952.000.000	37 OPD	1.008.300.000	37 OPD	1.068.470.000	4.283.770.000			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah data sektoral yang terkumpul	1000 data	200.000.000	1500 data	230.000.000	2000 data	250.000.000	2500 data	275.000.000	3000 data	300.000.000	3000 data	1.255.000.000	Diskominfo	Kota Dumai
				Membangun Metadata Statistik Sektoral	jumlah buku Statistik	1 buku	150.000.000	1 buku	230.000.000	1 buku	230.000.000	1 buku	230.000.000	1 buku	230.000.000	5 buku	1.070.000.000	Diskominfo	Kota Dumai

			Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	jumlah dokumen		-	-	115.000.000	115.000.000	115.000.000	115.000.000	115.000.000	460.000.000	Diskominfo	Kota Dumai				
			Peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	jumlah kapasitas SDM dalam peningkatan statistik sektoral		-	-	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	150.000.000	200 orang	600.000.000	Diskominfo	Kota Dumai			
			Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral	peningkatan pelayanan kelembagaan statistik sektoral		-	-	50 orang	50 orang	92.000.000	50 orang	105.800.000	50 orang	121.370.000	200 orang	399.170.000	Diskominfo	Kota Dumai	
			pengembangan infrastruktur	pembuatan dan pengembangan aplikasi data dan informasi		-	-	1 aplikasi	2 aplikasi	115.000.000	3 aplikasi	132.500.000	3 aplikasi	152.100.000	6 aplikasi	499.600.000	Diskominfo	Kota Dumai	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi		75%	350.000.000	75%	550.000.000	80%	615.000.000	80%	682.000.000	80%	777.000.000	80%	2.974.000.000		

				Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan sistem manajemen keamanan informasi		37 OPD	350.00 0.000	37 OPD	550.00 0.000	37 OPD	615.00 0.000	37 OPD	682.00 0.000	37 OPD	777.00 0.000	37 OPD	2.974.0 00.000		
				Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah an Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan sistem manajemen keamanan informasi		10 OPD	150.00 0.000	15 OPD	200.00 0.000	25 OPD	225.00 0.000	30 OPD	250.00 0.000	37 OPD	275.00 0.000	37 OPD	1.100.0 00.000	Diskomi nfo	Ko ta Du ma i
				Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pengelolaan informasi persandian		6 OPD	200.00 0.000	7 OPD	200.00 0.000	8 OPD	225.00 0.000	8 OPD	250.00 0.000	8 OPD	300.00 0.000	37 OPD	1.175.0 00.000	Diskomi nfo	Ko ta Du ma i
				pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/ kabupaten/	jumlah kapasitas SDM dalam peningkatan keamanan informasi		-	-	2 oran g	100.00 0.000	3 oran g	115.00 0.000	4 oran g	132.00 0.000	5 oran g	152.00 0.000	14 orang	499.00 0.000	Diskomi nfo	Ko ta Du ma i

				kota																	
				Penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota	laporan monitoring dan evaluasi keamanan persandian		-	-	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	4 dokumen	200.000.000	Diskominfo	Kota Dumai	
TOTAL										16.525.987.926		18.870.294.324		19.035.999.176		19.347.747.094		19.347.747.094		93.127.775.614	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Dumai.

Target indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai.

Berikut ditampilkan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun - 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
1	Persentase akses jaringan internet yang disediakan Pemerintah Daerah	-	82	85	90	95	100	100
2	Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang disampaikan melalui media	-	85	88	92	96	98	98

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai Tahun 2021-2026 yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika pada setiap tahunnya dan dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

Namun meskipun demikian, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan dari apa yang disajikan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan saran dan usulan yang dapat menyempurnakan Renstra ini, agar dapat mendukung pencapaian Visi Kota Dumai Tahun 2021-2026, yaitu: ***“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu”*** dapat tercapai dengan tepat sasaran dan tepat waktu.

Keberhasilan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan program/kegiatan bergantung pada tingkat koordinasi dari seluruh elemen terkait, yang implementatif dalam pelaksanaan tugas dalam fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Demikian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai Tahun 2021-2026 ini disusun. Semoga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat memperkuat terhadap pencapaian Visi Pemerintah Daerah Kota Dumai dalam RPJMD Kota Dumai 2021-2026.

Dumai, 2021
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA DUMAI



Drs. H. KHAIRIL ADLI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700511 199101 1 001